



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 149367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 670.000.000

1. Tanah Seluas 924 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 241.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2018, HADIAH Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000
4. MOTOR, VESPA PX/150 EXCLUSIVE Tahun 1989, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 331.787.453

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.266.787.453

III. HUTANG Rp. 136.831.111



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.129.956.342

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.